

Judul : Pemilihan Komisioner OJK, Komisi XI yakin pansel pilih calon berintegritas
Tanggal : Sabtu, 14 Februari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Pemilihan Komisioner OJK

Komisi XI Yakin Pansel Pilih Calon Berintegritas

Panitia Seleksi (Pansel) Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi membuka pendaftaran mulai Rabu (11/2). Pendaftaran dibuka secara online mulai 11 Februari 2026 pukul 00.00 WIB sampai 2 Maret 2026 pukul 23.59 WIB.

ANGGOTA Komisi XI DPR Habib Idrus Salim Aljufri menegaskan, proses seleksi komisioner OJK harus menjadi momentum pembenahan fundamental tata kelola sektor keuangan nasional, khususnya pasar modal. OJK ke depan tidak cukup hanya berperan sebagai regulator administratif, tetapi harus menjadi penjaga kepercayaan publik dan investor.

"Pasar modal adalah cerminan kredibilitas ekonomi sebuah bangsa. Ketika kepercayaan publik dan investor terganggu, yang dipertaruhkan bukan hanya angka indeks, tetapi reputasi Indonesia di mata dunia," ucap Habib, kemarin.

Ia menjelaskan, calon pimpinan OJK harus memenuhi tiga kriteria utama. Pertama, integritas tanpa kompromi. Tentunya dengan rekam jejak bersih, independen, serta berani mengambil keputusan berdasarkan kepentingan publik, bukan kelompok tertentu.

Kedua, pemahaman mendalam

terhadap industri keuangan domestik. Jadi tidak sekadar teori, tetapi memiliki pengalaman nyata di sektor perbankan, pasar modal, keuangan digital, hingga pengawasan risiko sistemik.

"Regulator harus memahami karakter investor domestik, dinamika emiten, serta praktik manipulasi pasar seperti saham gorengan, pump and dump, dan transaksi tidak wajar," jelas politikus PKS ini. Ketiga, visi reformasi dan semangat membangun. Tujuannya untuk memperkuat tata kelola sektor keuangan secara berkelanjutan.

Habib Idrus menilai, OJK perlu bergerak lebih progresif melalui penguatan pengawasan berbasis teknologi, peningkatan transparansi dan keterbukaan informasi, perlindungan investor ritel. Serta, penyeimbangan inovasi dengan prinsip prudential regulation atau regulasi kehati-hatian. "Jangan sampai kita hanya mengganti orang, tetapi tidak mengganti arah dan paradigma pengawasan,"



Habib Idrus Salim

tegasnya.

Menurutnya, tantangan saat ini bukan hanya menjaga stabilitas jangka pendek, melainkan memulihkan kepercayaan jangka panjang. Pasar modal yang sehat adalah pasar yang transparan, adil, dan kredibel.

Ia mengingatkan, Indonesia sedang memasuki fase penting penguatan sektor keuangan pasca-reformasi melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Karena itu, figur komisioner OJK harus mampu memahami dinamika arus modal global, responsif terhadap penilaian lembaga internasional, tegas terhadap praktik

manipulatif, sekaligus mendorong pendalaman pasar keuangan domestik.

"Ke depan kita ingin pasar modal Indonesia bukan hanya besar secara kapitalisasi, tetapi kuat secara fundamental dan bermartabat secara tata kelola," harap dia.

Komisi XI DPR tegas Habib Idrus akan menjalankan fungsi pengawasan dan uji kelayakan secara objektif, profesional, dan transparan. Karena lembaganya ingin memastikan figur yang terpilih benar-benar menjadi *guardian of trust* atau penjaga kepercayaan bagi sistem keuangan Indonesia.

"OJK bukan sekadar lembaga administratif, tetapi benteng stabilitas dan keadilan ekonomi nasional," tandasnya.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menambahkan, Pemerintah baru saja membentuk Pansel pemilihan calon pengganti ADK OJK. "Kita cari yang profesional saja," kata Said di Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Dia membantah soal isu titipan setelah beredar kabar Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun masuk dalam bursa calon Ketua Dewan Komisioner OJK. "Ya, enggak ada," elak politikus

PDIP ini.

Sementara, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun berkilah hingga saat ini masih diamanatkan menjadi ketua komisi dan belum menerima arahan apa pun soal pencalonan tersebut dari Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. "Tugas dari Ketua Umum Partai saya Pak Bahlil, saya sebagai Ketua Komisi XI DPR," ucapnya di Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Misbakhun mengaku belum ingin berspekulasi lebih jauh soal kemungkinan penunjukan tersebut. "Belum ada perintah selain perintah itu (Ketua Komisi XI) dan saya tidak mau berandai-andai," ucap politikus Golkar ini.

Terpisah, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Praseyo Hadi menekankan, pimpinan OJK harus menguasai ekosistem jasa keuangan nasional dan memahami peran strategis lembaga tersebut dalam menjaga stabilitas pasar. Pemahaman terhadap kondisi pasar modal sangatlah penting agar gejolak seperti penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tidak terulang kembali. "Pada saat ini, Pemerintah belum menerima nama calon pimpinan OJK," jelasnya. ■ TIF